

ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) **DAN REALITAS KESIAPAN SUMBER DAYA** **MANUSIA INDONESIA**

Nawawi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

This paper discusses the challenges of ACFTA, and the rise of China's economy which relies heavily on its human resource development threatening the position of Indonesia in the global economy. An important question is whether ACFTA can become a profitable momentum for Indonesia to enhance its national welfare, or whether it could weaken national economic sovereignty? It is largely believed that one of the most important aspects to gain optimum benefit from global competition is the readiness and the competitiveness of human resources, particularly through the development of technologies and sciences. In this context investment in human capital will lead every country to benefit from globalization. Therefore, of all the challenges faced in ACFTA, problems occurred to Indonesia's human resource development should be put as national priority.

PENGANTAR

Sejak 1 Januari 2010, perekonomian Indonesia menapaki babak baru dengan diberlakukannya perjanjian kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China atau *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Meskipun menuai pro dan kontra di dalam negeri, pemerintah Indonesia optimis bahwa Indonesia akan mampu bersaing dan memperoleh keuntungan dalam skema kerjasama tersebut. Optimisme ini didukung dengan kenyataan bahwa China merupakan salah satu pasar terbesar di kawasan Asia dan ekspor Indonesia ke China setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Selain itu, pangsa pasar ACFTA merupakan area perdagangan bebas yang sangat besar karena mencakup lebih dari 1,9 miliar penduduk dan memberikan tingkat pendapatan kedua terbesar setelah kerja sama sejenis di Uni Eropa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pihak yang kontra terhadap ACFTA dan meragukan kemampuan Indonesia untuk dapat bersaing dalam skema perjanjian perdagangan bebas tersebut. Di antara berbagai argumen yang ada, Indonesia masih dihadapkan pada kenyataan bahwa tingkat daya saing ekonominya masih rendah dibanding negara lain terutama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Brunai Darusalam yang tergabung dalam ASEAN-6 di ACFTA. Walaupun Indonesia dinilai berhasil menjadi salah satu dari sedikit negara yang sukses menangkal dampak krisis keuangan global 2008, perekonomian Indonesia tergolong rentan terhadap setiap gejolak sosial ekonomi dan politik yang mungkin terjadi di dalam negeri. Sementara itu dalam konteks kapasitas ekonomi, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan struktur ekspor yang masih berbasis produk primer, sektor industri yang lemah daya saingnya di pasar global dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan domestik, hingga rendahnya kelengkapan infrastruktur ekonomi (Bank Indonesia 2009:2).

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, bagaimana pun kerjasama ACFTA sudah bergulir dan menimbulkan berbagai konsekuensi. Pilihan kebijakan strategis dengan mengedepankan kehati-hatian dan bersifat taktis sangat diperlukan agar Indonesia mampu meraih keuntungan maksimal dari skema kerjasama ACFTA. Selain itu, dalam memahami peluang maupun ancaman ACFTA, tidak hanya dilihat dari sudut pandang hubungan Indonesia dan China, tetapi juga posisi negara anggota ASEAN yang menjadi kompetitor bagi Indonesia. Pergerakan kekuatan ekonomi baru di Kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam di sisi lain perlu diwaspadai agar peran Indonesia tidak hanya sebagai “pelengkap” dalam kerjasama ACFTA.

Selama ini dalam berbagai diskusi atau pembahasan tentang ACFTA, isu yang sering muncul selalu terkait dengan peluang sekaligus ancaman terhadap sektor-sektor ekonomi (usaha) Indonesia, termasuk ulasan tentang untung dan rugi bagi perkembangan ekonomi Indonesia terkait dengan implementasi kesepakatan ACFTA. Masih sedikit ulasan tentang realitas kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama jika dibanding negara pesaing yang memiliki kesempatan dan perlakuan sama dalam skema ACFTA. Mengapa ulasan tersebut menjadi penting? Kerjasama ACFTA tidak hanya mencakup kesepakatan peraturan perdagangan barang dan modal (investasi), tetapi juga meliputi bidang jasa yang di dalamnya termasuk liberalisasi sektor tenaga kerja.

Ketika ACFTA telah menjadi kenyataan, ini berarti bahwa batas-batas antarnegara akan semakin kabur dan sistem ekonomi akan semakin terintegrasi dan kompetitif. Hal ini menjadikan kegiatan ekonomi di berbagai negara menjadi semakin mudah serta efisien dan semakin tergantung satu dengan lainnya. Pada sisi lain, arus masuk keluar tenaga kerja akan semakin terbuka, bahkan mungkin akan semakin agresif, sehingga langsung atau tidak langsung gejala ini akan berdampak terhadap intensitas persaingan pasar kerja antarnegara. Konsekuensi logisnya, negara dengan SDM yang tidak siap akan tersisihkan dan hanya menerima berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Daya saing SDM, baik itu individu maupun kelompok (masyarakat, pemerintah dan dunia usaha), merupakan titik sentral dalam setiap proses pembangunan, termasuk dalam persaingan global. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa selain pembangunan ekonomi, kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya negara dengan daya saing SDM-nya yang tinggi yang mampu menuai manfaat dari keuntungan globalisasi (Nagib 2007:1). Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu dijawab: bagaimanakah realitas kualitas SDM Indonesia dalam konteks kesiapannya berkompetisi dalam ACFTA? Apakah dengan modal SDM yang ada pada saat ini Indonesia bisa dikatakan siap berkompetisi dan akan memperoleh keuntungan optimal dalam kerjasama ACFTA?

Tulisan ini bertujuan memberikan jawaban terhadap pertanyaan di atas serta menyampaikan pemikiran dan gagasan penulis terkait dengan peluang dan tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi ACFTA, khususnya dengan melihat kesiapan SDM di negara-negara yang tergabung dalam ACFTA. Tulisan ini dibagi menjadi lima bagian. *Pertama* membahas kebangkitan ekonomi China yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi persaingan ACFTA. Bagian *kedua* berisi ulasan tentang realitas kualitas SDM Indonesia terutama dilihat dari capaian indikator kesehatan dan pendidikan. Bagian *keempat* menyoroti ancaman serbuan tenaga kerja asing yang merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan ACFTA yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Bagian *kelima* berisi uraian tentang pentingnya Indonesia meningkatkan keunggulan kompetitifnya dalam menghadapi persaingan ACFTA.

KEBANGKITAN EKONOMI CHINA DAN PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

“Uthlubul Ilmi Walau Bishshiin” atau artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Begitulah pepatah yang sering disampaikan ketika memaknai sebuah keharusan untuk mencari ilmu dan terus belajar hingga akhir hayat seseorang. Tetapi, mengapa harus ke China? Apa istimewanya negeri tirai bambu ini sehingga pepatah yang awalnya diestafetkan oleh bangsa Arab berabad-abad lalu itu kini telah dikenal seluruh bangsa di dunia? Tentunya banyak pepatah lahir dari suatu kenyataan yang kemudian dijadikan pelajaran berharga untuk disampaikan kepada setiap orang agar dapat mengambil hikmahnya.

Terlepas dari esensi pepatah di atas, seluruh dunia saat ini tentunya mengakui kekuatan kebangkitan ekonomi China. Negeri dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini (sekitar 1,3 miliar jiwa) telah berubah menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. Belakangan ini sebutan China sebagai raksasa ekonomi dunia semakin diperkuat dengan keberhasilannya sebagai negara pengekspor terbesar dan berdaya saing tinggi. Bahkan, Amerika Serikat (AS) yang selama ini diakui sebagai poros kekuatan ekonomi dunia kini justru semakin bergantung pada ekonomi China. Kebangkitan ekonomi China telah menempatkan negara ini sebagai pusat industri manufaktur dunia, kekuatan militer yang disegani, pengendali perdagangan internasional, dan sekaligus penanam modal (investor) bagi sebagian besar negara-negara di dunia (terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin).

Kebangkitan ekonomi China merupakan cermin dari keberhasilan negeri tirai bambu ini memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya, sekaligus memperluas pengaruh ekonomi dan politik di berbagai kawasan. Padahal sejak berakhirnya era perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, tidak ada satu pun skenario yang memunculkan kebangkitan China sebagai penyeimbang kekuatan kapitalisme Amerika Serikat (Hadar 2010: 48). Integrasi China dalam ACFTA semakin memantapkan negeri ini sebagai penguasa ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Menurut Huntington (1997:87), kecenderungan regionalisasi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan wilayah perdagangan bebas tertentu menyebabkan hampir semua negara di dunia terseret arus persaingan yang tidak sehat.

Globalisasi telah membentuk pola kerjasama negara kawasan menjadi dua pola, yaitu kelompok negara yang dibentuk atas dasar kedekatan wilayah (seperti halnya ACFTA) dan kelompok negara yang dibentuk atas dasar skala ekonomi tertentu (Adrianto 2009:77). Pada kasus ACFTA, banyak pengamat yang melihat ACFTA sebagai langkah strategis China dalam merespon tantangan yang timbul dari kompetisi ekonomi regional khususnya untuk mengimbangi kekuatan blok ekonomi Amerika Serikat dan Jepang.

John Naisbitt telah memprediksi bahwa pada akhir abad ke-21 China akan berhasil menggeser kekuatan ekonomi Jepang di kawasan Asia Pasifik dan sekaligus menjadi pemain utama kekuatan ekonomi dunia. Prediksi Naisbitt dapat dilihat pada *Gross Domestic Product (GDP)* China tahun 2008 yang telah mencapai 4,42 triliun dollar Amerika Serikat, mendekati nilai GDP Jepang pada tahun yang sama yang mencapai 4,68 dollar AS sekaligus menggeser dominasi ekonomi Jerman sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga dunia. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi China antara 7-9 persen dalam beberapa tahun terakhir, China dipastikan akan menggeser Jepang sebagai negara dengan total GDP terbesar nomor dua di dunia (Naisbitt 2010:178).

Kebangkitan kekuatan ekonomi China semakin teruji dengan daya tahan ekonominya yang sangat kuat ketika hampir sebagian besar negara adidaya ekonomi mengalami krisis keuangan global sejak tahun 2008. Selama kuartal ketiga tahun 2009, perekonomian China mampu tumbuh mencapai 7,7 persen. Sementara itu, AS dan Jepang pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan minus, masing-masing -2,6 persen dan -6,0 persen. Melalui kebijakan stimulus ekonominya yang sangat terarah, China berhasil mempertahankan stabilitas ekspornya di tengah lesunya pasar global saat itu. Maka, sangat masuk akal jika banyak pengamat yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi global saat ini, kuncinya ada pada kekuatan ekonomi China dan Amerika Serikat.

Faktor apakah yang membuat ekonomi China saat ini begitu disegani bangsa-bangsa lain di dunia? Dalam bukunya *China's Megatrends*, John dan Doris Naisbitt (2010:1-246) mengemukakan delapan pilar yang menjadi fondasi masyarakat baru China bisa menjadi kekuatan ekonomi yang mengguncang dunia. *Pertama*, emansipasi pikiran. Pilar pertama ini merupakan penguatan ajaran seorang Deng Xioping (dikenal sebagai

“Bapak China Modern”) yang menyerukan pembebasan pikiran dari indoktrinasi ke emansipasi yang membebaskan rakyat memiliki pikiran sendiri. *Kedua*, penyeimbangan *top-down* (kebijakan pemerintah) dan *bottom up* (inisiatif rakyat) yang kemudian membentuk model baru “demokrasi vertikal” China. *Ketiga*, membingkai hutan (pemerintah mengelola kerangka kebijakan dan prioritas) dan membiarkan pepohonan tumbuh (rakyat berkontribusi secara menyeluruh). *Keempat*, menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan, yang mencerminkan perilaku pimpinan China pada awal perjalanan menuju China baru yang berani melakukan *trial and error*, eksperimen, tidak takut risiko dan berusaha menemukan cara terbaik dengan mencari kebenaran berdasarkan fakta. *Kelima*, persemaian artistik dan intelektual, yaitu mendukung dan mendorong sepenuhnya kemajuan ilmu dan pengetahuan sebagai motor penggerak kemajuan masyarakatnya. *Keenam*, bergabung dengan dunia, sebagai penegasan keterliban ekonomi, politik dan budaya China sebagai anggota masyarakat global yang maju atas kekuatannya sendiri. *Ketujuh*, kebebasan dan keadilan yang merefleksikan perjuangan untuk menyeimbangkan apa yang mungkin diraih secara ekonomi (kemajuan China) dan apa yang harus dipenuhi secara sosial (kesejahteraan rakyat China). *Kedelapan*, dari medali emas olimpiade menuju hadiah nobel, yang artinya sebuah strategi utama China menduplikasikan kesuksesan olimpiade ke dalam kinerja ekonomi dan daya saing untuk menjadi negara “inovasi dunia”.

I. Wibowo seorang ahli studi China, dalam bukunya *Belajar dari China* (2004), memaparkan salah satu kunci sukses kebangkitan ekonomi China, yaitu pilihan negara ini untuk mengadopsi kapitalisme secara hati-hati dan gradual. Dalam hal ini pemerintah China berperan sebagai pemegang kendali ekonomi untuk menjamin bahwa liberalisasi ekonomi dan peran swasta domestik ataupun global tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan industri dalam negeri China, terutama pada basis perekonomian rakyatnya. Di Indonesia disebut Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi didukung untuk terus maju, tetapi perusahaan milik negara masih tetap mendominasi dan menentukan arah perekonomian. Bahkan, pemerintah China cenderung protektif terhadap kepentingan industrinya dan baru mengizinkan perusahaan asing setelah perusahaan-perusahaan dalam negerinya dipastikan mampu bersaing. Misalnya, ketika perusahaan negara dalam sektor

migas seperti CNOOC, Sinopec, dan PetroChina telah benar-benar besar dan mendominasi sektor energi di China, barulah perusahaan asing di bidang energi diizinkan menanamkan modalnya di China (Launa 2010: 54).

Kebangkitan ekonomi China tidak terlepas dari keseriusan negeri ini dalam membangun daya saing kekuatan SDM-nya. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan dukungan jaringan China perantauan (*hoakiau*) yang tersebar hampir di seluruh negara, pemerintah China sadar bahwa hal tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung kebangkitan ekonomi China secara serius dan konsisten, seperti penguatan jaringan China perantauan, pemberian insentif pajak dan hak keistimewaan kepada warga negaranya yang berhasil menciptakan maupun membawa masuk kerjasama bidang-bidang strategis ke dalam negeri China.

Kebangkitan ekonomi China juga diakui sebagai hasil dari keberhasilan pemerintahnya memberikan perhatian yang besar dan serius terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat-pusat penelitian maupun pengembangan rekayasa teknologi yang terus berkembang pesat di China telah berhasil dan menarik masuk ribuan kerjasama penelitian hingga tingkat internasional. Melalui dukungan pendanaan yang sangat besar dari pemerintahnya ditambah jumlah SDM yang melimpah dan berkualitas, para insinyur China mampu merekayasa berbagai produk dengan *cost production* yang lebih rendah sehingga mampu berkompetisi dengan produk sejenis dari negara lain.

Bahkan, pemerintah AS dibuat gusar dengan semakin membanjirnya produk China di pasaran dunia dengan harga yang relatif lebih murah. Pada pertemuan tingkat tinggi Amerika Serikat dan China pada pertengahan tahun 2009, pemerintah Amerika Serikat berupaya menekan China untuk menurunkan nilai mata uangnya terhadap dollar Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menuding bahwa rendahnya nilai tukar mata uang China merupakan penyebab produk-produk Amerika Serikat di pasaran dunia menjadi mahal, sehingga konsumen lebih memilih produk *made in China* yang lebih murah dan bervariasi. Namun, dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, China bahkan berani menyerang balik Amerika Serikat dengan mengusulkan alternatif penggunaan mata uang internasional selain dollar Amerika Serikat.

Mengutip data dari *Science and Engineering Indicator 2006* dalam LIPI (2006:136-137), jumlah penduduk China yang berpendidikan S1 ke atas telah mencapai 20,4 juta orang, berada nomor dua setelah Amerika Serikat (52,7 juta orang). Pada tahun 2004 China telah berhasil mencetak 127.331 orang sarjana-magister dan 23.4446 orang doktor. Bandingkan dengan Indonesia dengan jumlah sarjana ke atas sekitar 2,8 juta jiwa (2004) dan jumlah lulusan S3 pada tahun 2003 hanya sebesar 644 orang (BPS 2005). Dalam rentang waktu empat tahun sejak 2001-2004 tercatat sebanyak 410.518 orang mahasiswa China di luar negeri telah menyelesaikan S2 dan S3. Dari jumlah tersebut yang telah kembali dan membangun China mencapai 24.729 orang (Launa 2010:54).

Bagi Indonesia, apa yang perlu dipelajari dari kebangkitan China saat ini? Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, dan posisi strategis Indonesia, semestinya tidak ada kata tidak mungkin bagi Indonesia untuk bangkit memperbaiki kinerja perekonomian nasional. Pada dasawarsa tahun 1990-an, ketika itu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen, Indonesia pernah diprediksi akan menjadi salah satu “macan” ekonomi Asia. Namun, karena “kesalahan urus” dan akibat sentralisme kekuasaan politik dan ekonomi yang berlebihan, perekonomian Indonesia malah terpuruk ketika diterpa krisis ekonomi tahun 1997. Menurut Faisal Basri dan Munandar (2009:11), kebobrokan kumulatif yang terjadi semasa Orde Baru sedemikian sangat parahnya membuat sendi-sendi perekonomian Indonesia menjadi sangat rapuh. Keberhasilan capaian pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan ternyata juga berisi “benalu” dan “virus” yang setiap saat menggerogoti perekonomian nasional. Pada akhirnya krisis tahun 1997 telah menguak “borok” dan “isi perut” perekonomian nasional saat itu.

Belajar dari pengalaman kebangkitan ekonomi China dan krisis ekonomi tahun 1997, masyarakat Indonesia harus mampu menjadikan kedua peristiwa tersebut sebagai momentum memperbaiki diri secara menyeluruh. Salah satu langkah cerdas yang dapat dilakukan adalah merevitalisasi pembangunan SDM Indonesia. Perjalanan sejarah negara-negara di dunia telah membuktikan bahwa kesuksesan suatu negara dalam menata pembangunan ekonominya dimulai dan dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM. Sebaliknya banyak negara yang memiliki aset SDA yang melimpah, tetapi kualitas SDM-nya rendah,

akhirnya keberlimpahan tersebut tidak menjadi berkah, tetapi malah menjadi musibah.

Michael J. Bonnel dalam *websitenya* menulis bahwa kesejahteraan suatu negara ternyata tidak pula ditentukan oleh kekayaan alamnya. Jepang yang 80 persen tanahnya tidak bisa dibudidayakan adalah negara terkaya nomor dua di dunia. Negara ini bagaikan gugusan kepulauan pabrik dan laboratorium yang mendatangkan aneka bahan baku dari seluruh dunia, lalu menjual produknya dengan harga sekian kali lipat ke seluruh dunia. Demikian pula dengan Swiss, yang sama sekali tidak punya perkebunan cokelat, tetapi menjadi penghasil aneka produk makanan awetan dari cokelat nomor satu di dunia. Meskipun indah, alam dan iklimnya cukup keras dan penduduknya hanya bisa bercocok tanam selama empat bulan setahun. Keterbatasan ini justru mendorong penduduknya untuk membuat produk awetan (cokelat, keju, yoghurt, susu kemasan, daging olahan) yang kini tergolong terbaik dan disukai di dunia. Tambang emas Swiss tidak ada apa-apanya dengan tambang emas Peru, dan Swiss bahkan tidak punya sama sekali tambang berlian seperti Afrika Selatan. Namun, Swiss-lah yang dikenal sebagai negara paling terpercaya di dunia untuk menyimpan uang, emas, berlian, dan berbagai kekayaan lain (dikutip dari Basri dan Munandar 2009:102).

REALITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Menurut teori ekonomi pembangunan konvensional, kegiatan produksi dalam unit ekonomi suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas empat faktor. Keempat faktor tersebut adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), aset (*capital*) dan keterampilan memanfaatkan teknologi. Semakin tepat komposisi gabungan dari pemanfaatan keempat faktor produksi tersebut, semakin efisien dan bernilai tinggi suatu produk yang dihasilkan. Namun demikian, sungguh pun kombinasi kualitas dan kuantitas keempat komponen tersebut mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah (*value added*), untuk menghadapi persaingan global hal tersebut masih dikatakan belum cukup. Pemanfaatan keempat faktor tersebut perlu dilengkapi dengan prasyarat kapabilitas pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha yang dapat menjangkau aksesibilitas masuk pasar global dan memenuhi permintaan sesuai tuntutan globalisasi. Dalam konteks ini, sangatlah penting membangun

kualitas SDM Indonesia yang memiliki kemampuan daya saing tinggi dan berwawasan global.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas SDM di suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dipublikasikan sejak tahun 1990 oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Secara konseptual IPM adalah perhitungan dengan formula tertentu yang menggabungkan tiga komponen utama, yakni (1) kualitas hidup materil yang diwakili oleh indikator tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) per kapita per tahun; (2) kualitas kesehatan penduduk yang diwakili oleh indikator usia harapan hidup (*life expectancy*); dan (3) kualitas pendidikan yang diwakili oleh indikator indeks pendidikan yang merupakan gabungan antara indeks melek huruf dewasa (yakni rasio penduduk dewasa yang melek huruf dan memiliki pengetahuan selayaknya) dan indeks penduduk dewasa yang mengikuti pendidikan formal pada berbagai tingkatan.

Dalam perkembangannya IPM juga digunakan untuk berbagai penilaian, seperti mengklasifikasi apakah sebuah negara termasuk negara maju, berkembang atau terbelakang dan sebagai pengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah sebuah negara terhadap kualitas hidup penduduknya. Dalam setiap analisis umum *Human Development Report* oleh UNDP, dinyatakan bahwa kenaikan 1 persen skor IPM akan mendorong kenaikan produktivitas tenaga kerja hingga 2,5 persen dan kenaikan tambahan pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 1,5 persen suatu negara. Meskipun IPM yang menekankan pada indeks komposit mempunyai berbagai keterbatasan (seperti diakui oleh perintisnya, yaitu ekonom peraih nobel Amartya San), formula tersebut telah diakui lebih baik dan komprehensif dibanding indikator GDP dan pertumbuhan ekonomi yang semula dipakai sebagai patokan utama dalam menaksir tingkat kesejahteraan suatu negara (Nagib 2007: 2; Basri 2009; 88).

Berdasarkan data *Human Development Report*, UNDP 2010 (Tabel 1) dapat diketahui bahwa kualitas SDM Indonesia terbilang masih rendah, terutama jika dibanding negara anggota ASEAN-6 yang tergabung dalam ACFTA. Realitas ini sangat memprihatinkan karena pada satu sisi Indonesia telah masuk dalam persaingan ACFTA, pada sisi lain Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya daya dukung SDM-nya. Indonesia hanya mampu mengungguli negara anggota ASEAN yang

akan bergabung pada ACFTA pada tahun 2015¹. Namun, perlu menjadi catatan penting bahwa Vietnam yang nilai IPM-nya selalu berada sepuluh tingkat di bawah Indonesia, secara perlahan tetapi pasti terus bergerak lebih maju. Bahkan, Kamboja dilaporkan memiliki tingkat capaian pendidikan lebih tinggi dari Indonesia dan terpilih sebagai salah satu negara terbaik di Asia dalam kecepatan capaian pembangunan SDM-nya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir². Dalam laporannya, UNDP mengategorikan Indonesia bersama Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara dengan predikat *Medium Human Development*, sementara Singapura dan Brunai Darussalam termasuk dalam negara *Very High Human Development*, sedangkan Malaysia masuk pada kategori *High Human Development*.

Tabel 3
Posisi IPM Indonesia dan Sejumlah Negara Anggota ASEAN, 2010

Negara	Ranking	Skor IPM
Singapura	27	0,846
Brunai Darussalam	37	0,805
Malaysia	57	0,744
Thailand	92	0,658
Filipina	97	0,630
Indonesia	108	0,600
Vietnam	113	0,572
Laos	122	0,497
Kamboja	124	0,494
Myanmar	132	0,451

Sumber: Human Development Report, UNDP, 2010.

Rendahnya IPM Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Walaupun secara nasional Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan di bidang pembangunan kesehatan dan pendidikan, secara internasional pencapaian Indonesia di kedua bidang tersebut

¹ Pada tahun 2015 kesepakatan ACFTA akan menyusul diberlakukan pada negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar.

² Berdasarkan *Human Development Report*, UNDP 2010, tingkat capaian pendidikan Indonesia adalah 5,7, berada di bawah Kamboja yang mencapai nilai 5,8. Di kawasan Asia Tenggara Malaysia berada di urutan paling tinggi dengan nilai 9,5 disusul oleh Singapura 8,8, Filipina 8,7, Brunai Darussalam 7,5 dan Thailand 6,6. Tingkat capaian pendidikan diturunkan dari rata-rata capaian pendidikan formal orang dewasa.

masih tertinggal jauh. Sebagai contoh, di bidang kesehatan ketersediaan tenaga medis (dokter dan perawat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk, jumlahnya masih sangat terbatas, yaitu hanya 13 orang dokter dan 62 orang perawat per 100.000 penduduk (UNDP 2006). Bandingkan dengan negara-negara lain (khususnya anggota ACFTA), yang memiliki jumlah dokter dan perawatnya lebih besar berpuluh kali lipat dari Indonesia, seperti China (106/334), Malaysia (70/135), Thailand (37/282), Filipina (58/169) dan Vietnam (53/56).

Pada bidang pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Basri dan Munandar (2009:107) berdasarkan hasil Penelitian Bank Dunia (2007), kinerja pendidikan rata-rata siswa berusia 15 tahun di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara tetangga (ASEAN-6)³. Simpulan yang sama juga ditunjukkan dari hasil survei tiga tahunan yang dilakukan PISA (*Programme for International Student Assessment*). Posisi kemampuan pelajar Indonesia untuk penguasaan membaca dan IPA berada pada peringkat 52 dari 57 negara yang disurvei pada tahun 2006 (Handayani, 2008:135). Indikator aspek pendidikan lain yaitu penggunaan akses informasi internet oleh masyarakat Indonesia juga masih tertinggal dibanding beberapa negara di kawasan ASEAN. Laporan UNDP 2010 menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet per 100 orang di Indonesia sebesar 7,9 jauh tertinggal dengan Singapura (69,6), Brunai Darussalam (55,3), Malaysia (55,8), Thailand (23,9), Vietnam (24,2), bahkan dengan Laos (8,5).

Realitas rendahnya kualitas SDM Indonesia bukan berarti Indonesia tidak mempunyai peluang memperoleh keuntungan dari kerjasama ACFTA. Dalam konteks rentang waktu, ACFTA bukan hanya berlaku satu atau dua tahun, tetapi jangka menengah (10 tahun) dan panjang (lebih dari 25 tahun). Bahkan, ke depan perjanjian kesepakatan lain akan segera diberlakukan seperti *Asean Economic Community* (AEC) pada tahun 2015. Hal terpenting adalah upaya pemerintah yang berkuasa saat ini dalam memanfaatkan ekspansi ekonomi yang telah dicapai diimbangi dengan perbaikan pembangunan sosial, terutama di

³ Skor penguasaan siswa Indonesia untuk Kalimat dan Bahasa: 382, Matematika: 360, dan Pemecahan Masalah: 361. Sementara siswa Thailand dengan kriteria yang sama memperoleh skor masing-masing 418, 417 dan 361.

bidang kesehatan dan pendidikan⁴. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil beberapa tahun terakhir harus dimanfaatkan untuk memacu perekonomian nasional demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apalagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJM) 2009-2014, pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga sasaran yang menjadi tujuan pembangunan nasional, yakni pro pertumbuhan (*pro-growth*), pro penciptaan kesempatan kerja (*pro-job*) dan pro pada pengurangan kemiskinan (*pro-poor*).

Salah satu peluang yang harus dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan SDM Indonesia adalah adanya perubahan struktur penduduk Indonesia yang mengarah kepada meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Hal ini terjadi karena antara tahun 1960 dan 2007, tingkat kematian bayi dan kelahiran menurun tajam di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2010, tingkat kematian bayi turun dari sekitar 216 menjadi 36 dan tingkat kelahiran turun dari 5.6 menjadi 2.2. Sementara tingkat pertumbuhan penduduk tumbuh konstan sekitar 1.9 persen per tahun sehingga terjadi perubahan distribusi umur penduduk di Indonesia (*demographic transition*).

Secara makro, meningkatnya jumlah penduduk usia produktif yang dibarengi dengan menurunnya jumlah penduduk usia tidak produktif akan memberikan peluang ekonomi berupa menurunnya rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*). Selanjutnya, tingkat output ekonomi akan meningkat sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk (usia produktif) yang masuk ke pasar kerja. Di tingkat rumah tangga, akibat dari menurunnya jumlah tanggungan (anak), akan memungkinkan meningkatkan jumlah tabungan (*saving*), tingkat pendapatan dan konsumsi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya output ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dalam tahapan ini disebut sebagai “*demographic dividend*”. (Lewis 2008; Mason 2001; Adioetomo 2005).

⁴ Pada penutup akhir tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa ekspansi Indonesia yang telah dimulai sejak Maret 2009 berpeluang untuk membawa Indonesia masuk dalam kelompok 10 besar perekonomian dunia pada tahun 2025. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dapat mencapai angka lebih tinggi yakni 6,5 persen. Menurut Komite Ekonomi Nasional, data historis menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi Indonesia dapat mencapai rata-rata tujuh tahun. Itu berarti perekonomian Indonesia masih akan berada dalam tahapan ekspansi hingga tahun 2016.

Menurut *United Nations Population Division* (2003) periode 2020-2030 diperkirakan merupakan “*golden period*” bagi Indonesia karena pada periode tersebut *dependency ratio* Indonesia akan mencapai titik paling rendah yaitu sekitar 44 per 100. Para *demografer* sering menyebut peluang tersebut sebagai “*window of opportunity*” yang hanya akan terjadi satu kali bagi penduduk di semua negara. Pada saat ini selain Indonesia, di kawasan ASEAN negara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand juga sedang berada pada fase awal dan pertengahan dari transisi demografi.

Namun demikian, untuk memanfaatkan peluang tersebut pemerintah Indonesia harus mempunyai komitmen yang serius untuk mengusahakan beberapa prasyarat, yaitu (i) penduduk usia kerja mendapatkan pekerjaan layak; (ii) meningkatnya tabungan rumah tangga yang dapat diinvestasikan untuk perluasan kesempatan kerja; (iii) meningkatnya perempuan di pasar kerja karena jumlah anak menurun; (iv) meningkatnya kualitas SDM Indonesia (Adioetomo 2005). Apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi maka peluang yang ada justru berubah menjadi ancaman atau “*the window of opportunity turns to the door to disaster*” (Handayani 2006:137-136; Nagib 2010:10).

TANTANGAN KEHADIRAN TENAGA KERJA ASING

Salah satu kekhawatiran dari pemberlakuan ACFTA sejak awal tahun 2010 lalu adalah permasalahan tenaga kerja Indonesia yang diperkirakan akan semakin kalah bersaing dengan kehadiran tenaga kerja asing (selanjutnya disingkat TKA). Bahkan, sebelum diberlakukan ACFTA sekalipun, pasar kerja Indonesia telah dibanjiri kehadiran TKA yang mayoritas berasal dari China dan negara-negara anggota ASEAN.

Seperti telah disinggung sebelumnya, kesepakatan kerjasama ACFTA yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia tidak hanya menyepakati arus bebas perdagangan dan investasi barang atau modal, tetapi juga bidang jasa, termasuk penggunaan TKA. Apalagi sebelumnya Indonesia bersama dengan negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati kesepakatan perdagangan jasa di tingkat ASEAN yang tertuang dalam *Bangkok Summit Declaration* dan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) dalam *ASEAN Summit ke-5* di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Desember 1995.

Kehadiran TKA merupakan fenomena yang biasa terjadi di era globalisasi sebagai konsekuensi terbukanya pasar kerja antarnegara. Apalagi, hal ini didukung dengan semakin pesatnya perkembangan inovasi teknologi informasi dan transportasi sehingga informasi tentang negara lain, terutama kebutuhan lapangan pekerjaan, menjadi mudah diakses. Penggunaan TKA biasanya bersamaan dengan masuknya investasi asing (penanaman modal) ke suatu negara. Artinya, selain menciptakan kesempatan kerja, kegiatan investasi asing di suatu negara juga membuka peluang *flight to quality* yaitu memberikan kemajuan bagi pengembangan kualitas SDM lokal melalui mekanisme *transfer of knowledge* dari kehadiran TKA.

Berdasarkan data Kemenakertrans RI, tercatat pada akhir tahun 2009 jumlah TKA di Indonesia sebesar 59.500 orang lebih, atau turun drastis dari tahun 2008 yang mencapai 83.453 orang. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari krisis keuangan global sejak tahun 2008 yang menimpa sebagian besar negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Sebagian besar pekerja asing di Indonesia berasal dari China (11.458 orang), Jepang (7.135 orang), Korea Selatan (4.437 orang), Malaysia (3.688 orang), Thailand (3.606 orang), Australia (3.491 orang), Amerika Serikat (3.307), Inggris (2.851 orang), Filipina (2.675) dan lainnya (12.520 orang). Sebagian besar TKA di Indonesia bekerja di sektor perdagangan (11.918 orang) dan industri (15.366 orang). Sementara itu, berdasarkan kriteria keahlian atau jabatan, sebagian besar TKA di Indonesia adalah tenaga profesional (21.251 orang), teknisi dan operator (17.294 orang), level manajer (9.234 orang), dan pemilik perusahaan (4.639 orang).

Meskipun dilihat secara demografis kuantitas jumlah TKA di Indonesia tidak besar dibanding jumlah angkatan kerja Indonesia (116 juta orang pada tahun 2010), tetapi dampaknya akan cukup berpengaruh. Alasannya, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan jumlah penganggur terbuka yang mencapai 8,59 juta orang ditambah dengan setengah penganggur yang mencapai 32,8 juta orang (Data BPS 2010). Sekitar 5 juta orang yang tergolong menganggur adalah tenaga kerja lulusan SMA, SMK, Diploma dan Universitas. Dengan kondisi ini, maka masuknya TKA akan semakin memperketat persaingan pasar kerja di Indonesia.

Menurut Ananta (1996) dalam Beni (1996:7-8) tantangan kehadiran TKA di Indonesia dapat dibedakan dengan melihat kondisi pasar kerja Indonesia yang mempunyai dua segmen berbeda. *Pertama*, segmen pasar kerja terampil yang membutuhkan keahlian atau pendidikan tinggi. Segmen pasar ini ditandai dengan adanya kekurangan permintaan (*labor shortage*), tingkat upah yang relatif tinggi dan prasyarat penguasaan skill tertentu. *Kedua*, segmen pasar kerja tidak terampil yang ditandai dengan kelebihan penawaran kerja (*labor surplus*), tingkat upah dan syarat pendidikan yang rendah.

Tantangan kehadiran TKA pada segmen pasar kerja pertama terjadi karena adanya kekhawatiran bahwa segmen ini akan kalah bersaing dengan TKA mengingat pengalaman dan wawasan kerja mereka yang umumnya masih bersifat lokal atau regional. Sementara TKA dalam segmen pasar ini biasanya memiliki pengalaman dan wawasan kerja yang bersifat internasional. Tantangan kehadiran TKA bagi segmen pasar kedua sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sejauh TKA yang bekerja di Indonesia tidak melakukan bidang pekerjaan yang mampu dilakukan oleh tenaga kerja di segmen ini. Akan tetapi, kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak TKA yang bekerja pada segmen pasar kerja ini. Ulasan data sebelumnya menunjukkan bahwa sekitar 35 persen TKA yang bekerja di Indonesia hingga akhir tahun 2009 adalah tenaga teknisi dan operator. Padahal, bidang pekerjaan teknisi dan operator pasti mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk TKA yang masuk ke Indonesia bermodalkan *Visa on Arrival (VoA)*, tetapi kemudian bekerja secara ilegal di sejumlah perusahaan (rekanan) asing yang banyak tersebar di seluruh Indonesia.

Mengantisipasi lonjakan kehadiran TKA di Indonesia, sejak pertengahan tahun 2010 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemakaian TKA di dalam negeri. Hal ini salah satunya untuk mengantisipasi agar peristiwa kerusuhan sosial seperti yang terjadi di PT Drydock World Graha di Batam Kepulauan Riau tidak terulang kembali (*Kompas* 28/4/2010).

Penggunaan TKA dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur dalam Bab VII mulai pasal 42 sampai 49.

Dalam undang-undang tersebut di antaranya diatur bahwa setiap perusahaan pengguna TKA wajib melaporkan rencana penggunaan TKA dan menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping tenaga kerja asing untuk alih teknologi dan keahlian. Namun, dari hasil penelitian LIPI (2010), ditemukan bahwa dalam realitasnya berbagai aturan terkait penggunaan TKA sering dilanggar, bahkan aturan yang ada masih menimbulkan permasalahan karena lemah dalam substansi, pengawasan dan penindakan hukum (Nagib dkk. 2010).

DARI KEUNGGULAN KOMPARATIF MENUJU KEUNGGULAN KOMPETITIF

Kesepakatan untuk menerapkan ACFTA per 1 Januari 2010 telah dirancang sejak lama dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China* oleh kepala negara ASEAN dan RRC pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Artinya, ada rentang waktu sekitar delapan tahun bagi negara-negara ASEAN untuk mempersiapkan masing-masing daya saing yang dimilikinya sebelum pelaksanaan ACFTA.

Singapura, Thailand, dan Malaysia dinilai banyak pengamat sebagai negara-negara anggota ASEAN-6 yang lebih siap dalam skema ACFTA melalui pengembangan keunggulan kompetitifnya. Ketiga negara ini menyadari bahwa tanpa persiapan matang, mustahil mampu bersaing dengan China yang secara ekonomi mempunyai kemampuan memproduksi barang murah dan didukung SDM yang berkualitas dan melimpah (*Kompas* 4/02/2010).

Thailand, misalnya sejak tahun 2005 telah menjalankan *dual track economy policy*, yaitu pemberian insentif pengurangan pajak untuk mendorong investasi dan industrialisasi, terutama pada perusahaan multinasional. Secara simultan insentif juga diberikan pada kegiatan usaha domestik yang mengembangkan produk lokal unggulan dalam rangka menggenjot daya saing produk domestik Thailand. Di bidang pembangunan SDM-nya, Thailand telah menyiapkan kebijakan pengembangan teknologi informasi melalui cetak biru berjudul "*Towards Social Equity and Prosperity: Thailand IT Policy into the 21st Century*". Rencana tersebut mencakup penyeimbangan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Thailand dengan meningkatkan

pembangunan infrastruktur informasi teknologi, termasuk di daerah pedesaan Thailand. Tujuan kebijakan tersebut salah satunya untuk meningkatkan kualitas daya saing masyarakat Thailand, terutama para petani agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk akses perkembangan informasi pasar nasional dan global. Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, pemerintah Thailand telah membentuk *The National Information Technology Committee* (NITC) yang bertugas menerapkan rencana nasional dalam pengembangan TIK dan mempromosikan penggunaan TIK di seluruh Thailand. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Thailand berusaha meningkatkan kualitas di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berstandar internasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Pemerintah Singapura dalam menghadapi ACFTA mengambil langkah kebijakan pengembangan teknologi inovatif, yakni memperkuat keunggulan kompetitifnya agar tidak disaingi oleh produk China. Menghadapi persaingan ACFTA, Singapura telah siap dengan penekanan pada dua komponen industri kompetitifnya, yaitu industri manufaktur dan jasa (*services*). Fokus industri teknologi inovatif yang dikembangkan Singapura adalah industri elektronik, kimia, teknik, komunikasi, *life sciences* dan media. Singapura juga tidak mau kalah dengan China dan Malaysia melalui promosi nilai tambah yang tinggi pada kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), logistik, dan pusat kegiatan bisnis multinasional. Dalam cetak biru (*blue print*) industri abad 21, Singapura menetapkan beberapa program yang berfokus pada memperkuat ekspor, membangun perusahaan bertaraf internasional, memperkuat usaha kecil dan menengah, membangun sumber daya manusia dan modal intelektual, standardisasi iptek dan inovasi, mengoptimalkan sumber manajemen, dan memperkuat posisi pemerintah (negara) sebagai fasilitator dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, pemerintah Malaysia, telah menyiapkan kebijakan percepatan pengembangan industri manufaktur teknologi tinggi dalam rangka menyiapkan daya saing produk domestik sekaligus menggenjot industri jasa, khususnya pariwisata. Percepatan pengembangan industri manufaktur Malaysia ditujukan untuk meningkatkan status dari industri berbasis perakitan (*assembling*) menjadi industri dengan *value added* lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah

Malaysia telah menyusun *blue print* dua strategi, *Pertama*, strategi pengembangan industri berdasarkan konsep klaster yang menekankan pada pengembangan sektor-sektor potensial untuk memperkuat jaringan industri dalam negeri Malaysia. *Kedua*, meningkatkan kemampuan SDM, riset dan pembangunan, penguasaan iptek, infrastruktur fisik, dan jasa untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional Malaysia.

Kemudian, bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Apakah ketika menandatangani kesepakatan ACFTA tahun 2002 para pemimpin Indonesia telah merancang strategi khusus (*blue print*) dan menyiapkan prasyarat-prasyarat penting lainnya seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, Malaysia, dan Thailand? Atau apakah pemerintah masih tetap berharap memperoleh keuntungan ACFTA melalui keunggulan komparatif, seperti upah buruh murah dan melimpahnya sumber daya alam? Sejauh ini, belum ada *blue print* yang jelas tentang strategi pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA. Namun, yang ada adalah justru usulan upaya peninjauan kembali aturan yang telah disepakati dalam ACFTA yang sekaligus menunjukkan ketidaksiapan pemerintah Indonesia.

Diakui memang selama ini pemerintah telah berupaya meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui peningkatan peran UMKM lewat kebijakan pelaksanaan UU No.20 tahun 2008, yaitu peningkatan akses pembiayaan dan pembinaan manajemen UMKM. Sejak pelaksanaan ACFTA, pemerintah Indonesia terus menggalakkan kampanye “Aku Cinta Produk Indonesia” agar daya saing pelaku usaha Indonesia terangkat naik. Namun, realitas di lapangan, misalnya di Pasar Tanah Abang, sudah dibanjiri produk tekstil asal China bahkan jauh sebelum penerapan ACFTA (Abeng 2010).

Dalam konteks persaingan ACFTA, hanya negara yang memiliki keunggulan kompetitif yang akan memperoleh keuntungan optimal, sementara sumber-sumber keunggulan komparatif tidak lagi memainkan peranan yang menentukan. Dengan perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang semakin cepat, setiap negara dapat dengan mudah dan efisien mengakses kebutuhan sumber daya yang tidak dimilikinya. Pada uraian sebelumnya telah disinggung bagaimana negara Swiss yang tidak memiliki perkebunan coklat, tetapi mampu menjadi negara penghasil produk olahan coklat terkenal di dunia. Indonesia adalah

negara produsen kelapa sawit (*oil palm*) terbesar di dunia, tetapi apakah Indonesia dikenal dari produk turunan yang bisa dihasilkan dari kelapa sawit?

Untuk mendukung pengembangan keunggulan kompetitif Indonesia, salah satu kuncinya adalah pembangunan masyarakat Indonesia (rakyat, pemerintah, dan dunia usaha) yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Masyarakat yang berbasis Iptek akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas nasional dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan daya saing bangsa di persaingan global.

Untuk menuju pada kondisi tersebut, Thurow (1999) dalam Zuhail (2008:17-23), menyampaikan lima elemen dasar sebagai prasyarat suatu masyarakat agar dapat bersaing di era global melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Pertama*, penataan masyarakat melalui penyiapan kondisi masyarakat yang tertata secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini masyarakat harus dijamin akses terhadap kegiatan ekonomi dan mengakomodir seluruh kemampuannya untuk peningkatan kualitas sumber daya yang dimilikinya. *Kedua*, kewirausahaan yang akan menciptakan kondisi masyarakat yang selalu mencari peluang, kreatif, inovatif dan menyukai tantangan. *Ketiga*, pembentukan pengetahuan yang akan menciptakan masyarakat yang selalu bertindak berdasarkan perencanaan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. *Keempat*, keterampilan sebagai *tool* masyarakat untuk menemukan pengetahuan baru, produk dan proses mutakhir, sehingga mampu bersaing dengan masyarakat lainnya dalam persaingan global. *Kelima*, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

PENUTUP

Persaingan antarnegara yang semakin kompetitif dalam era globalisasi telah mendorong negara-negara di berbagai kawasan membentuk berbagai kesepakatan dalam berbagai kelompok kerjasama ekonomi, sosial, dan politik. ACFTA adalah salah satu contoh dari hasil bentuk kecenderungan tersebut. Negara-negara anggota ASEAN dan China berusaha menyatukan berbagai tujuan secara bersama untuk memperoleh keuntungan optimal dalam kesepakatan liberalisasi

perdagangan barang, jasa, dan modal. Di antara anggota ACFTA, China merupakan negara yang memiliki posisi dominan dari segala aspek. Kemajuan ekonomi yang sedang dialami China diharapkan dapat menjadi “pelatuk” kemajuan ekonomi ASEAN. Sebaliknya, China juga memiliki agenda tersendiri dalam ACFTA sebagai *transmission* menguasai ekonomi dunia.

Dalam menghadapi ACFTA, kemampuan SDM Indonesia telah dan akan terus diuji secara terbuka dan menyeluruh, baik dari dalam maupun dari luar. Negara-negara maju, yang telah menyiapkan diri jauh sebelumnya, akan menjadi pemain aktif dan agresif dalam era kesejagatan pada saat ini. Sedangkan negara-negara berkembang (seperti halnya Indonesia) mungkin terpaksa memainkan peran pasif dan defensif, terutama agar tidak kalah bersaing. Dalam realitasnya persaingan global cenderung ditentukan oleh negara-negara yang kuat (secara ekonomi dan politik), sehingga negara-negara yang lemah cenderung hanya menerima berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan. Kondisi ini merupakan konsekuensi logis akibat dari ketidaksiapan SDM suatu negara untuk berkompetisi secara obyektif dan terbuka di arena internasional.

Berkaca pada realitas kurang siapnya SDM Indonesia dibanding negara pesaing dalam ACFTA, kiranya dibutuhkan kerja sangat keras dan cerdas agar Indonesia bisa bangkit dan mengejar kemajuannya. Optimisme tersebut masih terbuka lebar, mengingat Indonesia masih memiliki berbagai peluang untuk memperbaiki diri secara menyeluruh. Prasyarat utama adalah perhatian yang besar dari pemerintah, termasuk masyarakat dan dunia usaha, terhadap pengembangan SDM Indonesia yang menguasai Iptek.

Pengalaman beberapa negara yang semula memiliki SDA terbatas dan kemudian berkembang sebagai negara yang semakin maju, menunjukkan dengan jelas bahwa kemajuan tersebut diraih dari dukungan SDM yang kapabel dan menguasai Iptek. Dengan SDM yang menguasai Iptek, memungkinkan munculnya mata rantai yang menghasilkan kemajuan, produktivitas dan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut tidak mungkin terjadi di negara-negara yang tidak memiliki SDM berkualitas (terdidik). SDM yang terdidik adalah potensi dasar pembangunan, dan sebaliknya, SDM yang tidak terdidik adalah

beban pembangunan. Sebagai penutup, penulis mengutip pernyataan Robert B Reich, sekretaris mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, yang mengatakan bahwa aset terpenting dari sebuah negara di era keterbukaan informasi dan persaingan global adalah SDM yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai modal untuk mampu mendefinisikan masalah, menciptakan solusi, dan meningkatkan nilai tambah.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. *Bonus Demograafi: Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Amjad, Rashid. 2007. *Human Resource Planning: the Asian Experience*. New Delhi: ILO-ARTEP
- Adrianto, Jati. 2009. “Ekonomi Politik Globalisasi”, dalam Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Data Strategis BPS*. Jakarta: Katalog BPS
- Bank Indonesia. 2009. “Tantangan dan Peluang Penerapan ACFTA”, dalam *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV-2009*. Jakarta: Bank Indonesia
- Basri, Faisal dan Munadar, Haris. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Huntington, Samuel P. 1997. *The Clash of Civilization and Remaking of World Order*. New York: Touchtone Books
- John dan Doris Naisbitt. 2010. *China's Megatrends*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2006. *Indikator Iptek Indonesia*. Jakarta: LIPI Press
- Lewis, D.Blane.2008. *Demographic Transition and Economic Growth in Indonesia*. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
- Mason, A. 2001. *Population Change and Economic Development in East Asia: Challanges Met, Opportunitis Sized*. Stanford, Stanford University Press
- Nagib, Laila. 2007. “Pengembangan Sumber Daya Manusia: Sebuah Pengantar”, dalam Priyono Tjiptoherijanto dan Laila Nagib (ed), *Pengembangan Sumber Daya Manusia: diantara Peluang dan Tantangan*. Jakarta: LIPI Press.

- Nagib, Laila. dkk. 2010. *Hasil Kajian LIPI terhadap UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. LIPI: Laporan penelitian (tidak diterbitkan).
- Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2010. *Statistik Tenaga Kerja Asing Menurut Provinsi dan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kemenakertrans RI
- Sungkar, Yasmin. 2005. *Strategi ASEAN dalam Perluasan ASEAN +3*. Jakarta: LIPI Press.
- Suparno, Erman. 2009. *National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional): Sebuah Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif Global*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Surakhmad, Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wibowo, I. 2004. *Belajar dari China*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zuhal. 2008. *Kekuatan Daya Saing Indonesia: Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal

- Beni, Romanus. 1996. "Peluang dan Tantangan Kehadiran Tenaga Kerja Asing". *Warta Demografi*, tahun ke -26, No.1/1996. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hadar Ivan A. 2010. "China, ACFTA dan Kita". *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol.8/3/ Februari-Juni, 2010.
- Hamdi, Alhilar.2000. "Isu-isu Strategis Pembangunan Kependudukan di Masa Depan. *Warta Demografi*, tahun ke-30. No.1/2000. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Handayani, Titik. 2008. "Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia: Sebuah Catatan Kritis". *Masyarakat Indonesia*. Jilid XXXIV, No.2, 2008. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Launa. 2010. "ACFTA: Menengok Jalan China". *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol.8/3/ Februari-Juni, 2010.

Surat Kabar dan Website

- Abeng, Emil. 2010. "ACFTA, Antara Harapan dan Realitas" dalam *Kompas* 4/2/ 2010
- "Pekerja Asing untuk Pekerjaan Khusus di Indonesia" dalam *Kompas* 28 April, 2010
- [http://www.undp.org/human development reports](http://www.undp.org/human%20development%20reports)
- <http://www.aseansec.org/68.htm>.economic integration